

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Kajian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut Ganjar Kartasasmita (1997) dapat dilihat melalui beberapa sisi yakni; (1) Bagaimana menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi yang ada dikembangkan. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan (2) Bagaimana memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Penguatan ini menyangkut langkah nyata untuk menyediakan berbagai masukan dan membuka akses kedalam berbagai peluang untuk menjadi berdaya. (Henny Nurhendrayani, 2011:24)

Menurut Klidas (2001:18) “ *empowerment is seen as prusuing the narrow end of individual/group autonomy;.... it is defind as enhacing individual or group development to its full potential*” Pemberdayaan dikaitkan dengan upaya mengangkat keberadaan seseorang atau suatu kelompok masyarakat dari posisi lemah untuk dapat mengembangkan diri secara optimal. Sedangkan pemberdayaan perempuan lebih berkaitan

dengan peningkatan kualitas keterlibatan dan partisipasi mereka dalam bidang pekerjaan yang ditekuni (Saparinah Sadli, 1995).

Secara konseptual (Suharto, 2014) pemberdayaan atau pemberkuasaan(*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan mengandung pengertian bagaimana mendorong dan memotivasi daya atau potensi yang ada pada manusia, serta bagaimana membangkitkan kesadaran akan sumber daya itu menjadi berdaya atau mempunyai daya/kemampuan untuk menjangkau segala sesuatu dan dilakukan dengan bertanggungjawab serta dapat menunjang kehidupannya.

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan kekuasaan (*power*). Dalam tulisan Robert Chambers, kekuasaan (*power*) diartikan sebagai kontrol terhadap berbagai sumber kekuasaan, termasuk ilmu pengetahuan dan informasi, karena itu, pemikiran penting Chambers mengenai pemberdayaan masyarakat adalah pengambilalihan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan informasi, sebagai salah satu sumber kekuasaan yang penting, dari orang luar (peneliti dan agen pembangunan) oleh masyarakat. Caranya dengan

menggali dan menghargai pengetahuan teknologi lokal, serta menjadikan proses pembelajaran sebagai milik masyarakat bukan milik orang luar.

Adanya segelintir orang yang memiliki akses dan kontrol besar terhadap sumber-sumber kekuasaan dibandingkan orang yang lain merupakan struktur ketimpangan, sedangkan orang yang dirugikan disebut sebagai kelompok terpinggirkan atau kelompok lemah (*powerless*). Pemberdayaan adalah yang ditujukan untuk orang atau kelompok orang yang memiliki akses dan kontrol yang terbatas terhadap berbagai sumber kekuasaan di atas. Pemberdayaan adalah upaya untuk membela kelompok yang terpinggirkan. Tujuan pemberdayaan adalah untuk mengembangkan struktur masyarakat yang seimbang dan adil.

Sedangkan menurut Djohani Rianingsih (2003). Pengertian pemberdayaan di tingkat komunitas lokal antara lain :

Pemberdayaan adalah proses pengembangan hubungan yang lebih setara, adil, dan tanpa dominasi di suatu komunitas. Pemberdayaan memerlukan proses penyadaran kritis masyarakat tentang hak-hak dan kewajibannya. Pemberdayaan juga memerlukan proses pengembangan kepemimpinan lokal yang egaliter dan memiliki legitimasi pada rakyatnya

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah proses untuk memberi daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*) dan mengurangi kekuasaan (*disempower*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*) sehingga terjadi keseimbangan.

Pemberdayaan membutuhkan pembagian kekuasaan (*power sharing*) antara kepemimpinan lokal dan masyarakat (rakyat) secara adil. Pembagian kekuasaan yang adil berarti adalah penyelenggaraan sistem demokrasi di tataran komunitas (*community democracy*). Paling tidak itu yang saat ini dipercaya oleh gerakan demokrasi di seluruh dunia.

Menurut Tim Delivery (2004) bahwa sebenarnya ada beberapa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya sebagai berikut:

a. Tahap 1. Seleksi lokasi/wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

b. Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

Sosialisasi, merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk mencapai dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan

c. Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat

Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut bersama-sama melakukan hal-hal berikut :

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksud agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses ini meliputi: (a.) persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya, (b.) persiapan dan penyelenggaraan dan pertemuan, (c.) pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan, dan (d.) pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.
- 2) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi : (a.) memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah, (b.) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik, (c.) identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah, (d.) Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.

- 3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok. Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang kongkrit dengan tetap memperhatikan realisasi rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.
- 4) Memantau proses hasil kegiatan secara terus-menerus secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation/PME*) PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahap pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan dengan tujuannya PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan

d. Tahap 4. Pemandirian masyarakat

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola kegiatannya proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan factor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, meskipun faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud *selforganizing* dari masyarakat, namun kita juga

perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multi disiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu external factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu bagaimana menjalankan kegiatannya secara mandiri.

Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah adanya proses penyadaran diri dalam memanfaatkan segala potensi yang ada baik di dalam tubuh maupun lingkungan yang melalui berbagai tahapan dari mulai perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi sehingga dapat lebih berdaya.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh melalui upaya pendampingan. Pendampingan merupakan salah satu langkah penting yang perlu dilakukan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai diantaranya melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

2. Kajian Program

Anwar Harjono (2008) program merupakan urutan instruksi untuk menjalankan suatu komputasi. Selain itu, menurut Saifuddin Anshari (2009) Program merupakan daftar terinci mengenai acara dan usaha yang akan dilaksanakan. Kemudian, menurut Sukrisno (2009) Program adalah kata, ekspresi, atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur, yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.

Maka dapat disimpulkan dengan dilandasi dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas bahwasanya program merupakan suatu instruksi yang terinci yang disusun dan dirangkai menjadi kesatuan prosedur yang tujuannya dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi disekitar lingkungan.

3. Kajian Kelompok Wanita Tani

Kelompok Wanita Tani (KWT). KWT merupakan kumpulan para wanita tani yang berada di satu desa. Biasanya kelompok wanita tani ini berisikan dari istri-istri dari petani yang ingin mempunyai kegiatan lain selain dari mengurus keperluan rumah tangganya, kegiatan wanita tani atau KWT ini berupa pemberdayaan wanita tani yang berada di lingkungan tersebut, bisa berupa hasil olahan pertanian yakni seperti olahan masakan atau kerajinan bisa juga dari segi administrasi dari pertanian itu sendiri

4. Kajian Kawasan Rumah Pangan Lestari

Kawasan Rumah Pangan Lestari diwujudkan dalam satu Rukun Tetangga atau Rukun Warga/Dusun (Kampung) yang telah menerapkan prinsip Rumah Pangan Lestari dengan menambahkan intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya (Sekolah, rumah ibadah dan lainnya), lahan terbuka hijau, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil. Kementerian Pertanian telah menyusun konsep Model Kawasan Rumah Pangan Lestari yang merupakan himpunan dari Rumah Pangan Lestari (RPL) yaitu rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutannya, pemanfaatan pekarangan dalam konsep model KRPL dilengkapi dengan kelembagaan kebun bibit Desa, Unit pengolahan serta pemasaran untuk penyelamatan hasil yang melimpah (Kementerian Pertanian, 2011).

Adapun Strategi Pelaksanaan Kegiatan Rumah Pangan Lestari adalah sebagai berikut:

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita/keompok masyarakat lainnya untuk budidaya pada

lahan pekarangan maupun pengolahan hasilnya. Pekarangan yang selama ini belum dimanfaatkan adalah potensi yang dapat dikelola sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Upaya pemanfaatan lahan melalui KRPL dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan sebagai tambahan untuk memenuhi ketersediaan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Manfaat lain yang diperoleh dari kegiatan ini adalah berkurangnya pengeluaran keluarga sekaligus dapat memberikan tambahan pendapatan keluarga jika hasil yang diperoleh telah melebihi kebutuhan pangan keluarga.

Kegiatan KRPL dilakukan dalam lokasi pekarangan serta lingkungan perumahan lainnya seperti asrama, pondok pesantren, rusun dan lain-lain, dalam suatu kawasan. Melalui kegiatan KRPL ini diharapkan akan terbentuk suatu kawasan yang kaya sumber pangan yang diproduksi sendiri dari hasil pemanfaatan pekarangan.

Pendekatan pengembangan KRPL dilakukan melalui pengembangan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), yaitu dengan membangun kebun bibit, demplot, dan kebun sekolah serta mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (*local wisdom*). Selain itu kelompok juga mengembangkan demonstrasi plot Demplot sebagai sarana pembelajaran bagi kelompok untuk budidaya tanaman, ternak dan ikan. Demplot dapat memanfaatkan lahan fasilitas umum atau lahan lainnya yang tidak

dimanfaatkan. Demplot harus mudah diakses oleh anggota kelompok dan masyarakat sekitar. Disamping itu, kegiatan KRPL juga mengembangkan kebun sekolah yang berada di lingkungan kelompok sebagai media sosialisasi dan pembelajaran bagi anak usia sekolah tentang pemanfaatan pekarangan, budidaya dan pola konsumsi BZSA.

Mulai tahun 2018 Kegiatan KRPL akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

1. Tahap Penumbuhan (Tahun Pertama)

Pada tahap ini optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan konsep KRPL mendapat bantuan pemerintah sebesar Rp 50.000.000, minimal beranggotakan 30 rumah tangga/orang yang beraktivitas dalam satu kawasan dengan kegiatannya meliputi:

- a. Pembangunan kebun bibit
- b. Pembuatan demplot kelompok sebagai laboratorium lapangan
- c. Pengembangan pekarangan anggota
- d. Pembuatan Kebun Sekolah
- e. Pengolahan basil pekarangan dengan konsep B2SA
- f. Pendampingan

2. Tahap Pengembangan (Tahun Kedua)

Kelompok KRPL yang telah ditumbuhkan pada tahun pertama, akan dilanjutkan pada tahun ke 2 (Tahap Pengembangan). Pada tahap

pengembangan. kelompok KRPL akan mendapatkan bantuan pemerintah sebesar RP 15.000.000 untuk melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan kebun bibit
- b. Pembuatan demplot kelompok sebagai laboratorium lapangan
- c. Pengembangan pekarangan anggota
- d. Pembuatan Kebun Sekolah
- e. Pengolahan basil pekarangan dengan konsep B2SA
- f. pendampingan

Kelompok yang yang dapat melanjutkan ke tahap pengembangan harus memenuhi sebagai berikut:

- a. jumlah anggota telah bertambah menjadi minimal 40 rumah tangga
- b. demplot, kebun bibit masih eksis dan aktif.

3. Tahap Kemandirian (Tahun Ketiga)

Pada tahap ini, jumlah anggota telah bertambah menjadi 50 rumah tangga atau lebih, pemerintah pusat hanya melakukan monitoring dan pendampingan kegiatan KRPL sedangkan untuk pemeliharaan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah melalui dukungan APBD.

Dalam pelaksanaanya, kegiatan KRPL didampingi oleh Pendamping kelompok dan kabupaten/kota, serta dikoordinasikan bersama

dengan provinsi dan kabupaten/kota. Pendamping dan aparat tersebut diharapkan dapat mengawal pemanfaatan dana dan membantu kelompok dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Rahmat Taufiq NIM. 1316011059 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KRPL(KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI) GUNA MENUNTASKAN KEMISKINAN DI DESA KEDIRI, KECAMATAN GADING REJO, KABUPATEN PRINGSEWU

Abstrak

Penelitian ini mengarah kepada pemberdayaan yang mengacu kepada masyarakat yaitu melalui gapoktan tujuan dari pemberdayaan ini untuk penelitian mengetahui dan menganalisis fungsi Gapoktan Sekar Tani di Desa Kediri, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Peringsewu dalam pengentasan kemiskinan masyarakat desa. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat program Gapoktan Sekar Tani yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat desa. Kegunaan dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup melalui Gapoktan. Secara praktis diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para peneliti tentang peranan lembaga yang berorientasi pada Kelompok Tani Masyarakat.

2. Hesti Kusuma Yuwi Citra NIM : 13221230
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI
KELOMPOK WANITA TANI DI DESA
KARANGPATIHAN KECAMATANPULUNG
KABUPAEN PONOROGO

Abstrak

Program pertanian yang dilakukan oleh Kelompok Tani Citra Lestari merupakan suatu bentuk pemberdayaan perempuan di Desa Karangpatihan. Program ini berupaya untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah dan lahan pertanian. Bentuk program pertanian ini meliputi peternakan dan pertanian dalam satu lokasi. Pemberdayaan perempuan ini melibatkan kelompok tani Citra Lestari dan masyarakat sekitar dalam proses pemberdayaan. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui bentuk pemberdayaan dalam pelaksanaan program pertanian, 2) mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pertanian, 3) mengetahui peluang dan hambatan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan serta manfaat yang diperoleh setelah mengikuti program pemberdayaan. Metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Karangpatihan, kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Subjek penelitian adalah Kelompok Tani Citra Lestari mulai dari pengurus dan anggota. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo, PPL, dan Kepala Desa Karangpatihan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Bentuk pemberdayaan perempuan meliputi pertanian, pengembangan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Pemberdayaan perempuan dalam hal ini dilakukan di RT 01/02 dengan dibentuknya kebun bibit. Partisipasi perempuan dapat dilihat dari beberapa pelaksanaan program seperti pembentukan kelompok tani, membangun komunitas dan persiapan lahan. Dalam pelaksanaan program pertanian setiap masyarakat yang terlibat melakukan tahapan mulai dari pengelolaan tanah, pemilihan bibit, pembibitan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian hama dan penyakit serta tahap yang terakhir yaitu panen. Dalam tahapan ini dilakukan juga evaluasi setiap program pemberdayaan perempuan dengan anggota kelompok melalui musyawarah mufakat. Peluang yang ditemukan dalam program pertanian terpadu ini yaitu mata pencaharian sebagian masyarakat petani sehingga mudah untuk melakukan pemberdayaan pertanian, modal sosial yang kuat, kondisi daerah yang subur. Hambatan saat pelaksanaan seperti rendahnya sumberdaya manusia, kurangnya sosialisasi, masyarakat cenderung bosan dan tidak ada tindak lanjut. Manfaat yang dapat dirasakan masyarakat yaitu sarana menyalurkan hobi, meningkatkan pengetahuan, optimalisasi lahan pekarangan dan peningkatan kualitas konsumsi keluarga.

Kata Kunci : *pemberdayaan masyarakat, Kelompok Wanita Tani.*

3. Lucya Purnamasari NIM 10102241011 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KELOMPOK WANITA TANI (KWT)

BAGI AKTUALISASI PEREMPUAN DI DESA KEMANUKAN,
BAGELEN, PURWOREJO, JATENG

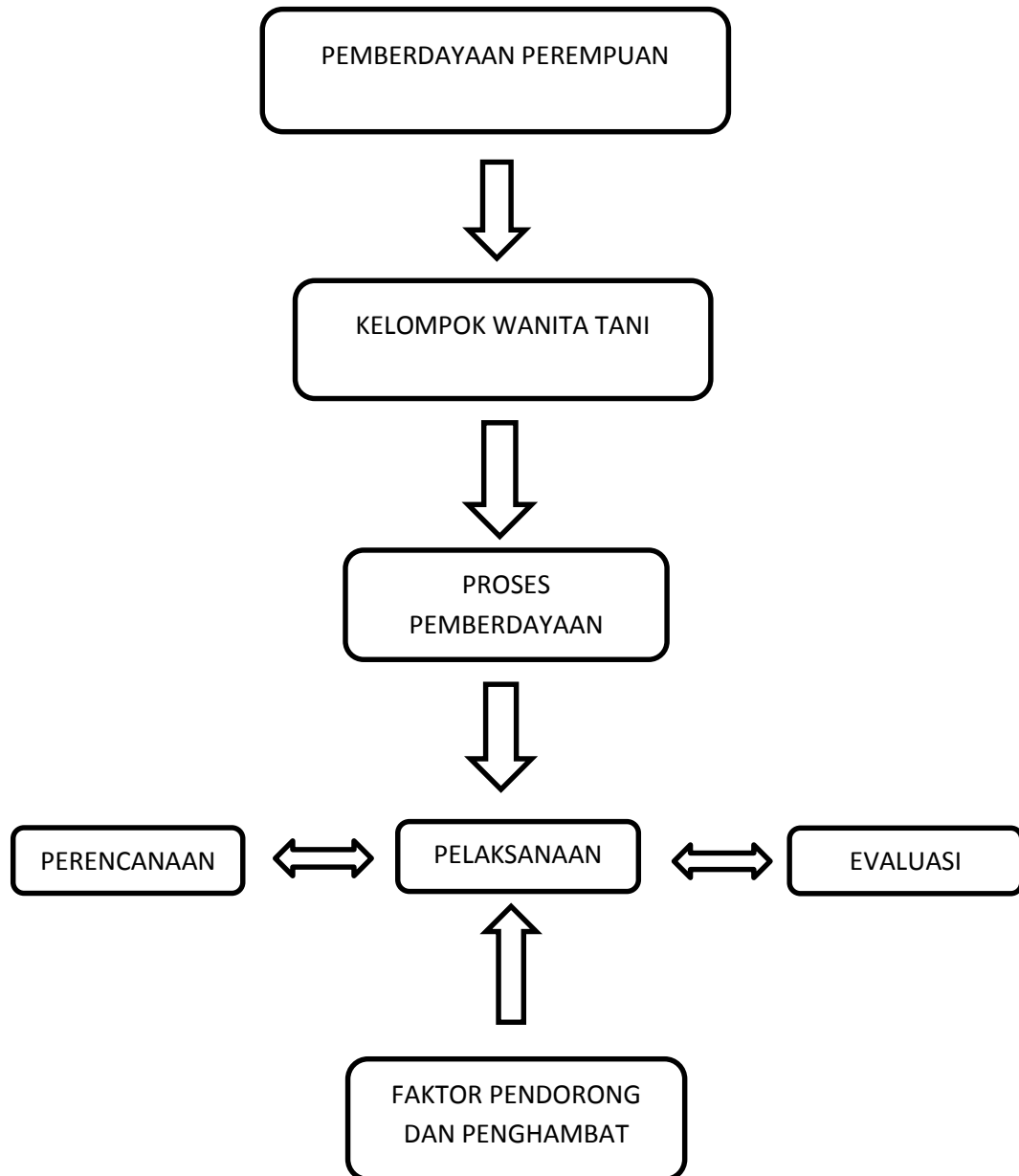
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Kemanukan, (2) Dampak KWT bagi aktualisasi perempuan di Desa Kemanukan, (3) Faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan-kegiatan KWT. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian adalah pengelola/pengurus, petugas PPL dan anggota KWT Desa Kemanukan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu dengan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemberdayaan perempuan melalui KWT di Desa Kemanukan meliputi: (a) kegiatan pertanian yang dilakukan oleh KWT, (b) pertemuan rutin untuk membahas kemajuan KWT, (c) sosialisasi dari PPL, (d) simpan pinjam. 2) Dampak KWT bagi aktualisasi perempuan di Desa Kemanukan yaitu meningkatnya ilmu dan pengetahuan tentang pertanian, adanya perubahan perilaku pada anggota ke arah yang lebih baik, keberadaan KWT telah diakui dan bermanfaat untuk masyarakat. 3)

Faktor pendukungnya yaitu partisipasi dan motivasi dari semua anggota KWT cukup tinggi, tersedianya fasilitas seperti lahan dan sarana pendukung pengolahan lahan di Desa Kemanukan, adanya kerjasama yang baik dari berbagai instansi terkait khususnya di bidang pertanian, dan dukungan dari masyarakat sekitar cukup baik. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan KWT adalah kurangnya perhatian pemerintah khususnya pada kelompok wanita tani. Hal ini nampak pada pemberian bantuan yang sangat terbatas, selain itu SDM wanita tani belum dikembangkan secara maksimal.

Kata Kunci: *Pemberdayaan perempuan, Kelompok Wanita Tani, aktualisasi*

C. Kerangka Pemikiran



Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu program pemerintah termasuk kedalam pemberdayaan masyarakat, untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya dari mulai pedesaan hingga

perkotaan. Perempuan dalam hal ini adalah istri-istri dari para petani dan tidak menutup kemungkinan juga bagi warga biasa yang ingin memiliki suatu kegiatan yang bermanfaat untuk membantu kesejahteraan rumah tangganya, dan memiliki ruang atau tempat untuk berbagi pengalaman, maka dengan hal itu pemerintah telah mengalokasikan dana untuk pemberdayaan perempuan ini, karena pada dasarnya setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, oleh karena itu kaum perempuan pun berhak mendapat pemberdayaan atau di berdayakan oleh pemerintah, maka dalam kesempatan kali ini peneliti ingin meneliti bagaimana proses pemberdayaan perempuan itu berlangsung melalui Komunitas Wanita Tani “DAHLIA” yang berada di Dusun Pasir Peuteuy Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan sampai ke tahap evaluasi, serta ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat, maupun yang menjadi faktor pendukung dalam pemberdayaan perempuan melalui Komunitas Wanita Tani “DAHLIA” yang berada di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ini

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses pemberdayaan perempuan melalui Kegiatan Rumah Pangan Lestari di Kelompok Wanita Tani “DAHLIA”?
2. Bagaimana hasil dari pemberdayaan perempuan di Kelompok Wanita Tani “DAHLIA” melalui Kegiatan Rumah Pangan Lestari?